



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**LAPORAN KINERJA  
(LKj)  
TAHUN 2020**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

---

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Tahun anggaran 2020.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023. LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai disusun sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 bahwa Kepala OPD wajib menyampaikan LKJ kepada Bupati paling lambat 2 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Berkenaan dengan hal tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Sinjai sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai turut berkewajiban untuk menyusun laporan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang Kelitbangan.

Penyusunan LKj Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai. Laporan ini disusun berdasarkan sistematika yang dijelaskan dalam surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 800/ 01.07.024 /Set Tanggal 5 Januari 2020 Perihal Penyusunan Laporan Kinerja OPD Kabupaten Sinjai Tahun 2020. Cakupan LKj Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi,

seperti : latarbelakang, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai pada tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 2 (Dua) indikator kinerja utama telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami berharap Laporan ini dapat memberikan dukungan terutama data dan informasi bagi Bupati Sinjaiterkait Kinerja dan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Masyarakat Kabupaten Sinjai.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2020 merupakan acuan perencanaan kegiatan Badan Litbang untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat pokok-pokok arah kebijakan, sasaran dan indikator kinerja, dan target keluaran kegiatan beserta alokasi pendanaan, yang digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup Badan Litbang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai dasar dalam mengukur pencapaian kinerja pada tahun anggaran tersebut. Renja Badan Litbang Daerah Kabupaten Sinjai disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang Tahun 2018-2023. Selain itu Rencana Kerja Badan

Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 ini merupakan pelaksanaan tahun Kedua pencapaian tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai.

Perubahan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tentang kebijakan program dan kegiatan dalam satu tahun, yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2020. Selain itu Rencana Kerja ini juga digunakan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai, disamping untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan. Untuk mempersiapkan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan juga dirumuskan kegiatan baru.

Akhirnya, semoga dokumen ini dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2020.

Sinjai, Februari 2021

**Kepala BALITBANGDA Kabupaten Sinjai**

**ARIFUDDIN, S.Sos., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19631228 199003 1 008

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii	
Daftar Isi	v	
Daftar Tabel	vi	
Daftar Gambar	vii	
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
	1.3 Gambaran Umum Organisasi Balitbangda Kabupaten Sinjai .....	3
	1.4 Isu Strategis .....	7
	1.5 Komposisi SDM Organisasi .....	8
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
	2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai .....	11
	2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	15
	2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	15
	2.4 Rencana Anggaran tahun 2020	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	19
	3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran .....	21
	3.2 Realisasi Anggaran .....	26
BAB IV	PENUTUP	29

## DAFTAR TABEL

Table 1.1	: Sarana dan Prasarana Balitbangda Tahun 2020 .....	6
Tabel 1.2	: Jumlah Pegawai Balitbangda berdasarkan Jenis Kelamin .....	9
Tabel 1.3	: Jumlah Pegawai Balitbangda Berdasarkan Pangkat /Golongan	9
Tabel 1.4	: Jumlah Pegawai Balitbangda Berdasarkan Pendidikan .....	9
Tabel 1.5	: Jumlah Pegawai Balitbangda Berdasarkan Eselon .....	10
Tabel 2.1	: Penjelasan Visi RPJMD kabupaten Sinjai 2018-2023 .....	11
Tabel 2.2	: Penjelasan Misi RPJMD kabupaten Sinjai 2018-2023 .....	12
Tabel 2.3	: Tujuan, sasaran, dan Strategis RPJMD .....	14
Tabel 2.4	: Tujuan, Sasaran Staregis dan Indikator Kinerja Balitbangda Kabupaten Sinjai .....	14
Tabel 2.5	: Program untuk pencapaian sasaran tahun 2020 .....	15
Table 2.6	: Perjanjian Kinerja Balitbangda Kabupaten Sinjai Tahun 2020	15
Tabel 2.7	: Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	16
Tabel 2.8	: Rencana Belanja Balitbangda kabupaten Sinjai tahun 2020.....	16
Table 2.9	: Alokasi anggaran per sasaran tahun 2020 .....	17
Table 3.1	: Target dan capaian Indikator Kinerja Utama.....	20
Table 3.2	: Skala Nilai Perangkat Daerah .....	21
Tabel 3.2	: Pencapaian Kinerja Balitbangda tahun 2020 .....	21
Tabel 3.4	: Perbandingan Pencapaian Kinerja .....	22
Tabel 3.5	: Perbandingan Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka menengah Tahun 2020 .....	22
Tabel 3.6	: Pencapaian Kinerja Balitbangda Tahun 2020 .....	24
Tabel 3.7	: Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran 2 .....	24
Tabel 3.8	: Perbandingan Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka menengah sasaran 2 Tahun 2020 .....	25
Table 3.9	: Pencapaian Kinerja dan anggaran tahun 2020 .....	27

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Struktur Organisasi Balitbangda Kabupaten Sinjai .....	5
----------	---	--	---

# BAB II

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2020 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Kinerja merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakannya.

Laporan Kinerja dibuat dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat dan pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu sebagai instansi pemerintah, BALITBANGDA Kabupaten Sinjai berkewajiban menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun anggaran sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja untuk kedepannya.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu Laporan Kinerja tersebut untuk mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 ini adalah :

1. Memberikan informasi tentang implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di BALITBANGDA Kabupaten Sinjai;
2. Memberikan informasi capaian kinerja BALITBANGDA Kabupaten Sinjai;

3. Menilai akuntabilitas kinerja BALITBANGDA Kabupaten Sinjai;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja BALITBANGDA Kabupaten Sinjai ke depan; dan.
5. Sebagai acuan untuk menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja tahun berikutnya.

### **1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI BALITBANGDA KABUPATEN SINJAI**

#### ***1.3.1 Dasar Pembentukan dan Aspek Strategis Organisasi***

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 83 tahun 2016 tentang kedudukan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai merupakan salah satu unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan predikat sebagai instansi teknis yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan kabupaten dibidang penelitian dan pengembangan yang diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal terhadap peningkatan hasil kelitbangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan Daerah; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

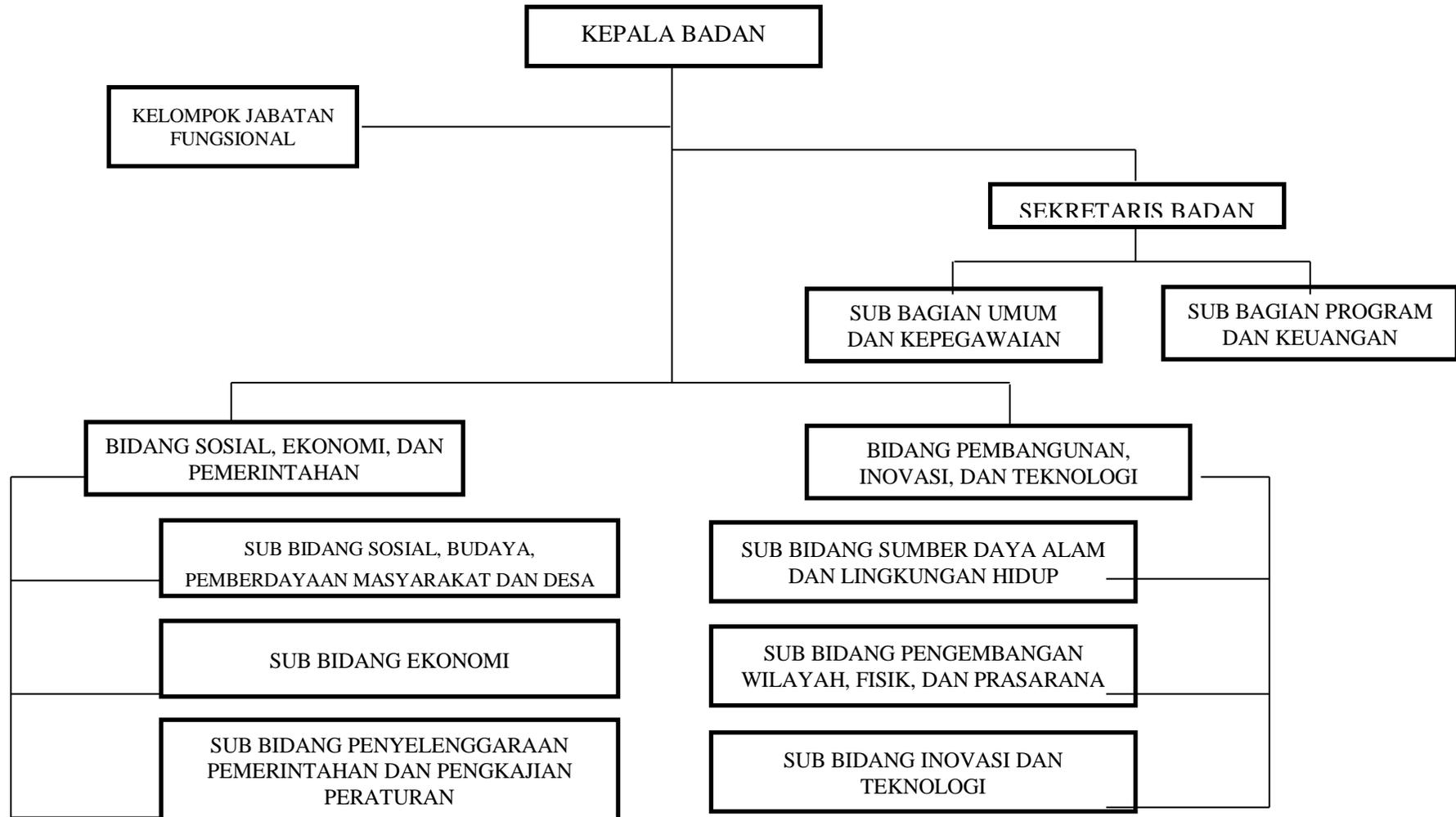
### **1.3.2 Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) subbag yakni:
  - Subbag Program dan Keuangan;
  - Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) subbid yakni:
  - Subbid Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - Subbid Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
  - Subbid Ekonomi;
4. Bidang Pembangunan, Inovasi, dan Teknologi, terdiri dari 3 (tiga) subbid yakni:
  - Subbid Inovasi dan Teknologi;
  - Subbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - Subbid Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagaimana gambar 1 sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi BALITBANGDA**



### 1.3.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal. Sarana dan prasarana kerja (perlengkapan) yang dikelola dan tercatat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

*Tabel 1.1  
Sarana dan Prasarana Balitbangda Kabupaten Sinjai Tahun 2020*

<b>NO</b>	<b>Jenis Aset</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Sepeda Motor	3 Unit
2	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2 Unit
3	Lemari Besi	2 Unit
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2 Unit
5	Kursi Kerja Eselon III	3 Unit
6	Kursi Kerja Eselon IV	8 Unit
7	Kursi Pimpinan	1 Unit
8	Kursi Staf	4 Unit
9	LCD Proyektor	1 Unit
10	Lemari Arsip	5 Unit
11	Meja ½ Biro	13 Unit
12	Meja Biro	3 Unit
13	Meja Kerja Pimpinan	1 Unit
14	Wireless	1 Unit
15	Hard Disk	2 Buah
16	Kursi Kerja	13 Unit
17	Layar Proyektor	1 Unit
18	Meja Komputer	3 Unit
19	Mesin Absensi	1 Unit
20	Note Book	10 Unit
21	Printer Dotmatrix	1 Unit
22	AC Split ½ PK	6 Unit
23	CCTV	1 paket
24	Laptop	3 Unit
25	Lemari Gantung	1 Unit
26	Meja Rapat	5 Unit
27	Kursi Rrapat	30 Unit
28	Mesin Rumput	1 Unit
29	PC. Desktop	3 Unit
30	Printer	7 Unit

#### **1.4. ISU - ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS SKPD (Strategic Issued)**

Output serta outcome dari suatu kegiatan yang dilaksanakan menjadi salah satu ukuran keberhasilan, oleh karena itu faktor pembiayaan atau alokasi anggaran untuk kegiatan menjadi sangat penting dan menentukan pencapaian sasaran dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 ini ada kebijakan optimalisasi anggaran yang telah dialokasikan atau peninjauan kembali terhadap alokasi anggaran untuk kegiatan diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka recofusing anggaran terkait Pandemi Covid 19, dimana kebijakan ini akan berdampak terhadap pencapaian target sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain permasalahan khusus di atas terdapat permasalahan umum sebagai Isu Strategis yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, yang dituangkan dalam Renja tahun 2020 adalah :

1. Dalam perencanaan, lembaga kelitbangan daerah diamanahkan untuk menyusun Rencana Induk Kelitbangan (RIK) dan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan (RENSTRA merupakan transformasi dari RIK dan R. SIDa) namun faktanya Kebutuhan kelitbangan daerah cenderung bersifat sangat dinamis sehingga dibutuhkan monitoring secara berkala terhadap dokumen perencanaan strategis.
2. Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia/aparatur sebagai pendukung kinerja kegiatan pembangunan khususnya pada level staff pelaksana (jabatan fungsional umum) hal ini terindikasi dengan masih adanya jabatan fungsional umum yang belum terisi sehingga berpotensi menghambat kinerja OPD. Serta terkhusus kelompok jabatan fungsional (Peneliti, Perakayasa, dan Analis Kebijakan) perlu menjadi perhatian khusus dalam pengisiannya demi menunjang kinerja BALITBANGDA.
3. Belum optimalnya peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator pada bidang penelitian dan pengembangan daerah, hal ini disebabkan karena masih banyak OPD yang belum memahami fungsi BALITBANGDA sebagai lembaga kelitbangan daerah dan menangkap peluang untuk memanfaatkan hasil kelitbangan sebagai dasar perumusan

kebijakan. Hal ini membuat minimnya dukungan dari OPD terhadap proses kegiatan Kelitbangan daerah.

4. Perlunya peningkatan kualitas ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah yang dapat mengakibatkan ketidakselarasan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan kebutuhan daerah.
6. Minimnya budaya dan motivasi dalam pengembangan inovasi daerah.
7. Jumlah anggaran yang dialokasikan belum mencukupi untuk mencakup keseluruhan isu-isu strategis. Hal ini dapat terlihat dari persentase dana yang dialokasikan untuk kegiatan Kelitbangan Daerah dari APBD Sinjai tahun 2020 yakni sebesar 0,03%.

Sedangkan prioritas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai untuk menindaklanjuti permasalahan yang menjadi isu strategis. Proritas tersebut diantaranya :

1. Penyusunan perubahan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) dan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan (RENSTRA Perangkat Daerah)
2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi secara intens ke SKPD, sehingga fungsi BALITBANGDA sebagai lembaga kelitbangan daerah dan menangkap peluang untuk memanfaatkan hasil kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan..

#### **1.5. KOMPOSISI SDM ORGANISASI**

Sumber Daya Manusia merupakan pilar utama berjalannya dan berhasilnya suatu organisasi apapun bentuk serta tujuannya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai didukung oleh 27 (dua puluh tujuh) orang pegawai yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang Pegawai Negeri Sipil dan 10 (sepuluh) orang Pegawai yang berstatus Sukarela. Rincian pegawai dapat dilihat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

*Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Balitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin*

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4
1.	PNS	13 Orang	4 Orang
2.	Sukarela	4 Orang	6 Orang
		<b>17 Orang</b>	<b>10 Orang</b>

2. Berdasarkan Pangkat / Golongan

*Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai Balitbangda Berdasarkan Pangkat / Golongan*

No.	Pangkat	Golongan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-
2.	Pembina	IV/a	3	-
3.	Penata Tk. I	III/d	3	2
4.	Penata	III/c	2	2
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1	-
6.	Penata Muda	III/a	1	-
7.	Pengatur Tk. I	II/d	-	-
8.	Pengatur	II/c	2	-
9.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-
10.	Pengatur Muda	II/a	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>4</b>

3. Berdasarkan Pendidikan

*Tabel 1.4  
Jumlah Pegawai Balitbangda Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4
1.	S2	5	1
2.	S1	6	2
3.	D3-D4	-	1
4.	SLTA Sederajat	2	-
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>4</b>

4. Berdasarkan Eselon

Tabel 1.5

*Jumlah Pegawai Balitbangda Berdasarkan Eselon*

No	URAIAN	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4
1.	Eselon II	1	-
2.	Eselon III/a	1	-
3.	Eselin III/b	2	-
4.	Eselon IV	5	3
5.	Non Eselon	3	1
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>4</b>

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

#### 2.1.1. VISI DAN MISI RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

Visi dalam RPJMD ini diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan selama periode 2018-2023. Rumusan visi ini dijabarkan dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023. Adapun rumusan visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023 sebagai berikut :

*“ Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing “*

Penjelasan dari rumusan visi ini adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1  
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023*

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Ber-keadilan dan Religius melalui Peningkatan Kua-litas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Mandiri	Kondisi perekonomian masya-rakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian
	Berkeadilan	Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya
	Religius	Kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah
	Unggul dan Berdaya saing	Kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut;

- (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif;
- (2) Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara

pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis

- (3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat
- (4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa
- (5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah
- (6) Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
- (7) Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan

Adapun penjelasan dari setiap misi sebagai berikut:

*Tabel 2.2.  
Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023*

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	Misi ini mencakup upaya umum pada berbagai aspek dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Mandiri
2.	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis	Misi ini mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pada standar minimal dan pelayanan umum lainnya yang strategis	Berkeadilan
3.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat	Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan kemandirian ekonomi masyarakat dan kemandirian keuangan daerah	Mandiri

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
4.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan keunggulan sumber-daya manusia pada aspek pendidikan dan kesehatan serta iman dan takwa	Unggul dan Religius
5.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah	Berdaya saing
6.	Mendorong terciptanya ketenteraman dan keter-tiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan ber-masyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Unggul dan Religius
7.	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber-daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam men-dukong keberlanjutan pembangunan.	Misi ini mencakup upaya umum dalam melestarikan ling-kungan hidup dan sumberdaya alam serta penanganan bencana	Unggul dan Berdaya saing

Dari visi tersebut diatas, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai, diupayakan semaksimal mungkin ditujukan untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar good governance. Dari beberapa misi tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai, terkait dalam misi dari RPJMD Kabupaten Sinjai,yaitu :

Misi 1 :Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif;

Sesuai dengan peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai yaitu Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data sebagai bahan formulasi kebijakan bagi perangkat daerah sesuai bidang tugas masing agar tercipta kebijakan yang efektif (tepat sasaran), efisien dalam penganggaran (minim margin error) sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

### 2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berikut tujuan strategi berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

*Tabel 2.3  
Tujuan dan Sasaran dan Strategi RPJMD*

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3	5
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif;	Mewujudkan birokrasi yang baik	Terwujudnya integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik	Mendorong pengawasan yang ketat terhadap seluruh siklus pemerintahan secara bersinergi dengan keterbukaan informasi public ber-basis elektornik

*Tabel 2.4  
Tujuan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja  
Balitbangda Kabupaten Sinjai*

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja
1	2	3	4
Meningkatnya fungsi kelitbangan dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Cakupan kebijakan daerah yang memanfaatkan hasil kelitbangan dan inovasi	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
		Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung peningkatan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi

### 2.1.3. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program - program. Adapun program - program untuk mendukung masing - masing sasaran Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.5

## Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No	SASARAN	PROGRAM
1	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan pembangunandaerah	- Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; - Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
2	Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung peningkatan daya saing daerah	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Litbang darah; - Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

**2.2. PERJANJIAN KINERJA 2020**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA SKPD, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) 2020, IKU dan APBD. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Perjanjian Kinerja Balitbangda Kabupaten Sinjai Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	
1.	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %
2.	Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung peningkatan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	54 %

**2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.7  
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran	Indikator	satuan	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	Jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah dikali 100%	Renstra, Renja, RKPD
Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung peningkatan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	%	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dibagi Total Perangkat Daerah dikali 100%	

#### 2.4. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2020, jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan adalah sebesar Rp. 3.008.287.857,02 namun setelah adanya reconfusing / perubahan anggaran turun sebesar Rp. 2.438.539.487,00 atau berkurang sebesar (Rp. 569.749.370,02) atau (18,94 %) yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8

Rencana Belanja BALITBANGDA Kabupaten Sinjai TA 2020

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.784.104.237,00	73,16
2	Belanja Langsung	654.435.250,00	26,84
<b>Jumlah</b>		<b>2.438.539.487,00</b>	<b>100</b>

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program - program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9  
Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun Anggaran 2020

Sasaran	Indikator	Anggaran	Persentase
Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	229.166.200,00	55%
Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung peningkatan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	187.874.100,00	45%
		<b>417.040.300,00</b>	<b>100%</b>

Pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran pertama Sasaran Meningkatkan fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah sebesar Rp. 229.166.200.00 dan terealisasi sebesar Rp. 224.550.000 atau sebesar 98,00 % yang terdiri dari program:

- Program Peningkatan Penelitian dn Pengembangan social, ekonomi, dan pemerintahan yang terdiri dari kegiatan :

1. Kajian Prospek Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sinjai.

Adapun target kinerja kegiatan ini 1 dokumen, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 65.957.600.00 dan terealisasi sebesar Rp.65.500.000,00 atau sebesar 99,31%, dengan keluaran yaitu dokumen hasil kajian Prospek Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sinjai.

2. Kajian Pengembangan Sapi Potong di Kabupaten Sinjai.

Dukungan anggaran belanja kegiatan ini sebesar Rp. 67.992.600.00 dan terealisasi sebesar Rp. 67.493.000,00 atau sebesar 99,27 %, dengan keluaran yaitu dokumen hasil Kajian Pengembangan Sapi Potong di Kabupaten Sinjai.

- Program Peningkatan Penelitian dn Pengembangan Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Lingkungann Hidup yang terdiri dari kegiatan :

1. Kajian Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Pertanian.

Taget awal kegiatan ini adalah 1 dokumen, namun setelah adanya kebijakan refocusing, anggaran kegiatan ini turun sebesar Rp. 13.750.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.648.000 atau sebesar 99,25 %. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

## 2. Pengembangan Model Rencana Mitigasi Penanganan Bencana.

Adapun dukungan anggaran belanja kegiatan ini sebesar Rp. 68.956.100.00 dan terealisasi sebesar Rp. 65.506.000,00 atau sebesar 95,00 %, dengan keluaran yaitu dokumen hasil kajian Pengembangan Model Rencana Mitigasi Penanganan Bencana.

## 3. Kajian Pengembangan Agrowisata Tahura A.Abdul Latief.

Taget awal kegiatan ini adalah 1 dokumen, namun setelah adanya refocusing, anggaran kegiatan ini turun sebesar Rp. 12.509.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.403.000 atau sebesar 99,15 %. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Untuk Sasaran Kedua yaitu Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung peningkatan daya saing daerah sebesar Rp. 187.883.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 185.183.000,00 atau sebesar 99,00 %, yang terdiri dari :

- Program peningkatan Kapasitas kelembagaan Litbang Daerah, terdiri dari kegiatan :

### 1. Promosi Hasil Inovasi dan Teknologi Daerah

Kegiatan ini didukung anggaran sebesar 27.659.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.513.000,00 atau sebesar 99,47 %

- Program pengembangan Inovasi daerah, terdiri dari kegiatan :

### 1. Pengembangan Kluster Inovasi Komoditi Unggulan Daerah.

Kegiatan ini didukung anggaran setelah refocusing, sebesar Rp. 9.402.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.033.000,00 atau sebesar 85,44 %. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

### 2. Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Inovasi teknologi Potensi Komoditi Unggulan Daerah.

Dukungan anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 140.342.200.00 dan terealisasi sebesar Rp. 139.158.000,00 atau sebesar 99,16 %, dengan keluaran yaitu dokumen hasil kajian Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Inovasi teknologi Potensi Komoditi Unggulan Daerah.

### 3. Laboratorium Inovasi.

Kegiatan ini didukung anggaran setelah adanya kebijakan refocusing, sebesar Rp. 10.479.000,00 dan terealisasi sebesar 100%. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang direncanakan dan diperjanjikan pada tahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian Visi dan Misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, dengan cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran predikat nilai capaian kerjanya.

Secara umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai Perangkat Daerah (PD) penunjang di bidang penelitian dan pengembangan, telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Spesifik
- b. Dapat diukur secara obyektif
- c. Menggambarkan hasil
- d. Relevan dengan kondisi yang diukur
- e. Cukup untuk mengukur kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan realisasinya, perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, perbandingan realisasi dengan target rencana strategis, perbandingan dengan capaian nasional, perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran, dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3.1  
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100
Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung peningkatan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	%	54	15	28

Dari 2 (dua) IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 100 persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Balitbangda Kabupaten Sinjai Tahun 2020 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

*Tabel 3.2*  
*Skala Nilai Peringkat Kinerja*

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 -100	Sangat Bak	ST
2.	76 < 90	Baik	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

### 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Untuk mengukur capaian kinerja organisasi tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijaksanaan program dan kegiatan dimana indikator tersebut telah disesuaikan antara Perjanjian Kinerja dengan indikator kinerja sasaran kegiatan pada tahun anggaran 2020.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 dan akan dipergunakan untuk mengukur kinerja untuk tahun 2020. Pencapaian indikator tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

#### a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini

*Tabel 3.3*

*Pencapaian Kinerja Balitbangda Sasaran 1 Tahun 2020*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020		
				Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>						<b>100</b>

Dari kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan capaian kinerja 100 persen.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

*Tabel 3.4  
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran 1*

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2016	2017	2018	2019
1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbanganz	-	100	100	100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis inipada tahun 2019 telah berhasil memenuhi target yaitu dengan capaian 100 persen.

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

*Tabel 3.5  
Perbandingan Kinerja Tahun ini dengn Target Jangka Menengah sasaran 1 Tahun 2020*

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian %		
			Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-rata Realisasi sampai tahun ini	Capaian (0 %)
1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah indikator sudah mencapai target 100% dan target tersebut merupakan target awal selama priode renstra.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran menunjukkan capaian sangat tinggi (ST).

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Persentase Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, yang mencapai target, ini didukung

dengan adanya Kerjasama dengan Bapelitbangda Provinsi, perangkat daerah terkait dengan kelitbangan yang dilaksanakan.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Renstra yang mencapai target ini adalah sebesar Rp 229.166.200,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 224.550.000,00 atau 98,00 %.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang mencapai target ini didukung dengan adanya program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Sosial, ekonomi dan pemerintahan; dan Program Peningkatan penelitian dan pengembangan pembangunan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2020, dinilai berhasil, yakni terealisasinya target kinerja yang diprioritaskan pasca re-focusing anggaran dan kegiatan. Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian ini berasal dari adanya kerja sama tim dan koordinasi yang baik antar pihak terkait sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Meskipun dengan keterbatasan interaksi social dengan adanya status pandemi covid-19 , BALITBANGDA Kabupaten Sinjai tetap berupaya melaksanakan seluruh program/kegiatan dengan baik yakni melalui pemanfaatan fasilitas daring. Partisipasi aktif unsur Kelitbangan Kabupaten (personel dan tim ahli) serta stakeholder yang terkait dengan ruang lingkup kegiatan kelitbangan dalam pelaksanaan FGD maupun pengumpulan data dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

**a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini**

*Tabel 3.6*

*Pencapaian Kinerja Balitbangda Sasaran 2 Tahun 2020*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung peningkatan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	%	54	15	28
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>						<b>28 %</b>

Dari kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, ini belum berhasil memenuhi target yaitu hanya mencapai sebesar 28 persen.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

*Tabel 3.7*

*Perbandingan Pencapaian Kinerja sasaran 2*

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2016	2017	2018	2019
1.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	-	100%	100 %	36%

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini pada tahun 2019 belum berhasil memenuhi target kinerja, dan hanya mencapai 36 %.

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

*Tabel 3.8*  
*Perbandingan Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah*  
*Sasaran 2 Tahun 2020*

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian %		
			Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-rata Realisasi sampai tahun ini	Capaian (0 %)
1.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	%	54%	15 %	28%

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah indikator hanya mencapai target sebesar 54 % dan target tersebut merupakan target awal selama priode renstra.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran menunjukkan capaian sangat rendah (SR).

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Kegagalan pencapaian indikator pada sasaran Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan Inovasi, tidak didukung oleh pendanaan, adanya penghapusan kegiatan yang disebabkan adanya pandemic covid-19, dan adanya kebijakan refocusing anggaran dan kegiatan pendukung.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi dalam Renstra adalah sebesar Rp 187.874.100,00,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 185.183.000,00 atau sebesar 99,00 %..

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator pada sasaran Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi didukung oleh

program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah; dan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Litbang Daerah. Kegagalan pencapaian target kinerja disebabkan karena tidak optimalnya ketersediaan dana karena adanya kebijakan rasionalisasi/re-focusing anggaran dan kegiatan OPD, adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan harus dibatalkan dan ditunda pelaksanaannya, termasuk kegiatan Laboratorium Inovasi yang diharapkan sebagai pemacu meningkatnya budaya inovasi daerah.

Sedangkan untuk alternatif solusi yang dilaksanakan adalah adanya kebijakan Kepala BALITBANGDA yang mengatur bahwa Cakupan penelitian menyempit dan diprioritaskan kepada hal-hal substansial, dan Lebih fokus pada mematangkan konsep LABINOV secara internal yang dapat terlaksana tanpa penganggaran khusus. Melakukan kegiatan secara terintegrasi ditempat yang samadengan hanya menambah waktu sehingga kegiatan yang dihasilkan lebih efektif dan efesien.

### **3.2. REALISASI ANGGARAN**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 98,30 % dari total anggaran yang dialokasikan. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semapkin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada Tahun 2020 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Table 3.9  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran	Program	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.	1 Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan	100	100	100	133.950.200	132.993.000	99,29
		2 Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100	100	100	95.216.000	91.557.000	96,16
2.	Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung peningkatan daya saing daerah	1 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Litbang Daerah	100	100	100	27.659.600	27.513.000	99,47
		2 Program Pengembangan system Inovasi Daerah	100	100	100	160.223.500	157.670.000	98,40

**Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

Kondisi pandemi memaksa penyampaian beberapa laporan dari Peneliti mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan, sehingga dapat mempengaruhi proses penyampaian rekomendasi ke Stakeholder.

**Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :**

Perlunya kerjasama antara peneliti dengan pejabat pendamping yang dapat memberikan arahan dalam melaksanakan kegiatan baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun pada saat melakukan penelitian harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan sehingga para peneliti dapat mengoptimalkan penyelesaian penelitian dan kajian secara tepat waktu.

Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi;

- a) Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi
- b) Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D;
- c) Melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19;
- d) Melakukan revisi penghematan anggaran terkait pandemi Covid-19;
- e) Melakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Presentase ketersediaan hasil riset dan inovasi Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2019, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 adalah baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai ke depan yakni Perencanaan pembangunan daerah belum berbasis pada kajian kelitbangan; Perkembangan lingkungan strategis, terutama antar daerah yang senantiasa berpacu untuk mengembangkan daerah masing-masing sehingga memaksa setiap daerah mampu kompetitif/berdaya saing;

Sinergitas antara Balitbang dengan kalangan akademisi, bisnis, pemerintah dan masyarakat, untuk menghasilkan isu-isu yang dibutuhkan untuk pengembangan daerah belum optimal; dan Terbatasnya kapasitas kelembagaan internal litbang daerah. Selain itu dalam meningkatkan kinerja organisasi, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai dihadapkan pada kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) jabatan fungsional peneliti dan perekayasa serta kepakaran yang dimiliki yang terbatas, sementara bebannya, baik berdasarkan hasil analisis jabatan maupun realita yang ada cukup besar sehingga perlu adanya penambahan SDM jabatan fungsional peneliti dan perekayasa serta kedudukan OPD Penelitian dan Pengembangan yang diharapkan memiliki porsi lebih dalam memberikan saran maupun rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah Sinjai.

Bagi instansi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

## Lampiran-lampiran :

**PRESTASI TAHUN 2020  
DAFTAR TANDA PENGHARGAAN/PRESTASI YANG DITERIMA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

No.	Nama Penghargaan	Tingkat			Diserahkan Oleh/ Penyelenggara	SKPD Yang Menerima	Keterangan
		Nasional	Provinsi	Kabupaten			
				<b>NIHIL</b>			

**MOU TAHUN 2020  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

No.	Nama Penghargaan	Tingkat			Diserahkan Oleh/ Penyelenggara	SKPD Yang Menerima	Keterangan
		Nasional	Provinsi	Kabupaten			
				<b>NIHIL</b>			